

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Australia merupakan negara tetangga dari Indonesia. Letaknya yang sangat dekat dengan Indonesia merupakan sebuah takdir geografis yang tidak bisa ditolak, kedua negara tersebut harus mampu menciptakan suatu kemitraan yang sehat, yang dapat menjamin kestabilan kawasan mereka. Indonesia menjalin hubungan dengan Australia segera setelah kedaulatan Indonesia diakui oleh Belanda melalui Konferensi Meja Bundar (KMB). Hubungan tersebut meliputi berbagai bidang, antara lain politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan keamanan.

Isu yang aktual adalah peristiwa pemberian suaka terhadap 42 WNI oleh pemerintah Australia. Pencarian suaka oleh WNI asal Papua yang kemudian diberikannya visa sementara oleh Australia, membuat hubungan Indonesia-Australia kembali memanas setelah sebelumnya mengalami pasang surut oleh isu-isu yang muncul. Pada tanggal 18 Januari 2006 dikabarkan bahwa 43 WNI mendarat di Cape York, Australia Utara. Kemudian visa sementara itu dikeluarkan Kamis siang tanggal 23 Maret 2006. Keputusan menteri Imigrasi yang pada saat itu dijabat oleh Amanda Vanstone yang mengizinkan 42 dari 43 warga Papua pencari suaka untuk tinggal di Australia.

Penulis dalam hal ini mencoba untuk menggambarkan alasan yang

terhadap 42 WNI. Tentu saja Australia memiliki sebab dan alasan dibalik peristiwa tersebut.

B. Tujuan Penulisan

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan Strata satu di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Disamping itu skripsi ini ditujukan untuk memberikan gambaran yang empiris dan obyektif mengenai:

1. Sistem Politik Australia.
2. Sikap partai-partai dan gereja serta kelompok kepentingan lainnya di Australia dalam kaitannya dengan kebijakan pemberian suaka (Proses Input).
3. Sikap pemerintah Australia terhadap tuntutan yang muncul dalam kaitannya pemberian suaka, yaitu sikap HoR dan Senat dalam menyikapi tuntutan (Proses Konversi dan Output).

Diharapkan skripsi ini akan membawa pencerahan bagi penulis dan pembaca yang budiman.

C. Latar Belakang Masalah

Sebagai suatu bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat, menjalin hubungan dengan negara lain adalah suatu kebutuhan yang memang harus dilakukan untuk mempertahankan eksistensinya dan memenuhi apa yang menjadi kepentingan nasional ataupun hal lain yang mengiringinya. Australia dan Indonesia mempunyai posisi yang berdekatan dan memaksa

Problem yang dihadapi Australia setelah menjadi beberapa koloni cukup rumit. Namun dengan kemauan dan kesadaran nasional yang tinggi akhirnya lahirlah Commonwealth of Australia pada tahun 1901. Lahirnya bentuk federasi Australia tersebut merupakan awal pemerintahan baru yang harus mampu menentukan garis-garis kebijaksanaan pemerintahannya.

Australia mengalami kebangkitan dan kemajuan yang dibarengi dengan tiga pengaruh kuat yaitu komposisi etnis, penemuan kekayaan mineral dan pemenuhan kedaulatan. Keterlibatan Australia di dalam percaturan politik internasional sangat menonjol terutama setelah Perang Dunia II.

Sejak Agresi Belanda I Australia telah duduk sebagai anggota KTN yaitu Komisi Jasa-Jasa Baik PBB yang ingin membantu menyelesaikan masalah Indonesia-Belanda secara obyektif. Tugas ini dilanjutkan dengan nama UNCI dimana Australia secara obyektif menekan Dewan Keamanan untuk mengharuskan Belanda menarik mundur tentaranya dari Indonesia.¹

Indonesia menjalin hubungan kerjasama dengan Australia segera sesudah kedaulatan Indonesia diakui oleh Belanda melalui KMB pada tanggal 27 Desember 1949. Hubungan tersebut meliputi bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan bahkan kerjasama militer.

Hambatan yang terjadi dalam hubungan Australia-Indonesia dikarenakan adanya perbedaan persepsi. Dalam hal ini terdapat dua faktor yang sangat menentukan arah dan sifat dari hubungan tersebut.

Pertama, kawasan geografis dimana kedua negara berada, hal ini memaksa mereka untuk menghilangkan perbedaan yang mendasar dalam evaluasi jangka panjang mengenai konsep strategis yang mempengaruhi kebijakan politik luar negeri kedua negara. *Kedua*, kenyataan pengalaman perbedaan sejarah kedua negara, perkembangan lembaga-lembaga politik dan sosial budaya, memerlukan pendekatan yang serius agar tidak terjadi berbagai salah pengertian.

Pentingnya Faktor geografis dalam kebijakan luar negeri Australia pertama kali dikemukakan oleh Menteri Luar Negeri Percy Spender pada 1950.² Geografis Australia menempati lokasi yang strategis dikawasan Asia Tenggara dan Pasifik Selatan, serta dikelilingi oleh dua samudra besar, yaitu samudra Hindia dan samudra Pasifik. Samudra Hindia yang mengapit sisi barat negeri ini merupakan jalur transportasi yang mengaitkan Australia dengan benua Afrika, anak benua India dan kawasan Asia Tenggara; sementara bagian timurnya yang dikelilingi oleh samudra Pasifik menghubungkan negeri ini dengan bagian utara dan selatan benua Amerika. Selain itu, garis pantai utara Australia juga dipagari oleh pulau-pulau Pasifik Selatan, dengan pulau New Guinea (yang sekarang ini terbelah oleh dua negara: Indonesia dan PNG) sebagai penyangga utamanya. Kepentingan Australia terhadap pulau-pulau di utaranya bermakna strategis dalam sistem pertahanan Australia: sebagai benteng pertahanan dari invasi musuh, yang sekaligus sebagai titik kelemahan utamanya.

2. xvii. A. H. H. ... Australia dan Indonesia, 1945-1962 (Jakarta: Diambatkan, 1993).

pemikiran mengenai “serangan dari utara”, atau “musuh dari utara”, yang sering tergambar dalam kebijakan pertahanan dan luar negeri Australia.

Setelah melihat faktor geografis, yang menekankan pendekatan tiga sisi dan dua samudra yang mengelilingi benua Australia, maka perlu pula dilihat faktor kesejarahan yang membentuk masyarakat Australia. Faktor kesejarahan ini membentuk apa yang disebut oleh Hilman Adil sebagai “tradisi ke-Inggris-an”.⁴ Sejarah Masyarakat Australia tidaklah dapat dilepaskan dari induknya, Inggris. Penjelajah Inggris terkemuka, Kapten James Cook, adalah orang pertama yang diutus Pemerintah Inggris untuk membuka pemukiman bagi para narapidana Inggris di wilayah New South Wales pada 1787.

Kedua faktor yang telah dijelaskan di atas, geografi dan sejarah, selalu dipertimbangkan oleh para pemimpin Australia ketika melaksanakan politik luar negerinya. Dalam melihat politik luar negeri Australia, kita juga harus menimbang gaya kepemimpinan di antara partai-partai yang berkuasa, terutama di antara Partai Buruh dan Koalisi Liberal-Nasional. Ketika memerintah, menteri luar negeri, baik Partai Buruh ataupun Koalisi Liberal-Nasional, mengambil pendekatan yang sama, sekalipun tidak identik.⁵ Sekalipun terjadi pergantian pemerintahan, kelihatannya terdapat suatu konsensus nasional yang luas di antara partai yang berkuasa, untuk tidak mengubah kebijakan luar negeri yang telah diambil oleh pemerintah sebelumnya.

⁴ Adil, *Ibid.*, hlm. 9

⁵ Barry M. Coldrey, *Australian Foreign Policy For Senior Students* (Blackburn: Dove Communications, 1986), hlm. 6.

Pasca kemerdekaan RI hubungan Australia-Indonesia terus berlanjut hingga pada tahun 1950 mengalami ketegangan, sebab Indonesia yang pada waktu itu berada dibawah pimpinan Presiden Soekarno mengambil jalan keras dalam menyikapi masalah Irian Barat. Presiden Soekarno mengerahkan kesatuan militer untuk menguasai Irian Barat. Sementara perjuangan diplomasi dilakukan dengan menggalang kekuatan dunia ketiga, yaitu dengan membina hubungan persahabatan dengan negara-negara yang berorientasi maupun berideologi komunis, seperti Vietnam Utara, Korea Utara, RRC, maupun Uni Sovyet. Disamping itu, kebijakan politik poros-porosan seperti Jakarta-Peking-Hanoi dan lain-lainnya dibangun Indonesia sebagai penentangannya terhadap negara-negara Barat. Munculnya Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai salah satu kekuatan besar di Indonesia melalui Pemilu 1955, dan bahwa PKI ini mendukung garis politik luar negeri Soekarno yang kekiri-kirian membuat Australia semakin khawatir, dan membuktikan bahwa Indonesia tidak mampu membendung komunisme. Dan pada akhirnya, memang Australia tidak mampu berbuat apa-apa setelah Irian Barat kembali ke pangkuan Indonesia pada 1962 dan menjadi bagian NKRI melalui *Act of Free Choice* atau Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) dibawah supervise PBB pada tahun 1969. Hubungan kedua negara bertetangga inipun menjadi dingin.⁶

Ketegangan yang terjadi antara Indonesia dengan Australia semakin diperburuk dengan adanya kegagalan persetujuan Manila pada tahun 1963.

⁶ -

Kegagalan itu membuat Australia melihat tindakan-tindakan Indonesia sebagai ancaman terhadap kepentingan keamanan Australia.

Kemudian muncul masalah baru yang mengganggu, yaitu persoalan mengenai Timor-Timur. Persoalan Timor-Timur ini mewarnai kebijakan luar negeri Australia selama jabatan kedua PM Whitlam dari Partai Buruh (1974-1975) dan selama PM Koalisi Liberal-Nasional, Fraser (1975-1983), dan ketika Partai Buruh Hawke berkuasa sejak 1983.⁷

Kerjasama militer juga dikembangkan secara progresif. Pada tahun 1995, Perdana Menteri Australia Paul Keating dan Presiden Soeharto menandatangani perjanjian keamanan sebagai satu-satunya persetujuan keamanan bilateral Indonesia. Hubungan tersebut memberikan keuntungan yang spesifik bagi Indonesia, bahwa Australia mengakui kedaulatan yang sah bagi Indonesia terhadap Timor-Timur. Dimana Indonesia melakukan intervensi setelah penarikan Portugal dan merupakan konflik internal di tahun 1975.

Akhirnya Januari 1999, Habibie, sebagai pengganti Soeharto mengambil jalan referendum guna memecahkan persoalan Timor-Timur dengan alternatif kemerdekaan bagi Timor-Timur, jika masyarakatnya menolak pengaturan ekonomi. Voting untuk menentukan nasib Timor-Timur dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1999 serta berjalan dengan cara yang

suara terdaftar.⁸ Pada tanggal 4 September 1999 PBB mengumumkan bahwa hasilnya besar sekali yaitu 78,5% suara pemilih jatuh pada pilihan kemerdekaan.⁹ Menurut Ali Alatas, mantan Menteri Luar Negeri Indonesia, menyebut kemunduran 10 tahun dalam hubungan itu.¹⁰ Puncaknya terjadi pasca pengumuman referendum tanggal 4 September 1999, ada suara tentang pembekuan hubungan diplomatik, dan pada tanggal 16 September 1999 Pemerintah Indonesia mengakhiri Perjanjian Pemeliharaan Keamanan dengan Australia yang sudah terjalin sejak 18 Desember 1995, sebagai lambang ketidaksenangan pada Australia atas sikapnya yang cenderung mendukung lepasnya Timor-Timur dari Indonesia.

Kemudian peristiwa peledakan bom yang terjadi di dua tempat di Indonesia juga mempengaruhi hubungan Australia-Indonesia, yaitu bom Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, yang meluluhlantakkan Sari Club dan Paddy's Café, serta bangunan-bangunan lain di sekitar Legian, Kuta, Bali. Tragedi tersebut menewaskan 184 jiwa yang umumnya warga negara asing dan mayoritas warga negara Australia. Belum hilang dari ingatan mengenai peledakan bom di Bali, hubungan Australia-Indonesia dihentakkan lagi dengan adanya peledakan bom di depan Kantor Kedutaan Besar Australia di jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan pada tanggal 9 September 2004. Peristiwa peledakan bom Kuningan pastinya akan merubah pola tingkah laku dan kebijakan politik luar negeri Australia terhadap Indonesia.

⁸ Chris Manning dan Peter Van Diemen, *Indonesia ditengah Transisi, Aspek-aspek Sosial Reformasi dan Krisis*, Yogyakarta, LKIS, 2002 hal 21

⁹ Tempo, 12 September 1999

¹⁰ Kompas, 20 September 1999

Kemudian peristiwa terakhir yang mengakibatkan ketegangan antara Indonesia-Australia adalah peristiwa suaka Papua. Setelah adanya peristiwa pencarian suaka oleh WNI asal Papua yang kemudian diberikannya visa sementara oleh pemerintah Australia, hubungan antara RI dengan Australia kembali memanas. Hal tersebut benar-benar menyinggung pemerintah Indonesia. Warga Papua yang mencari suaka itu tiba di Cape York, Australia Utara 18 Januari 2006, yang kemudian ditempatkan di Christmas Island hingga mendapatkan visa sementara. Visa sementara itu dikeluarkan Kamis siang 23 Maret 2006. Keputusan menteri imigrasi Amanda Vanstone dibawah Departemen Imigrasi dan Multikultural yang mengizinkan 42 dari 43 warga Papua pencari suaka untuk tinggal di Australia. Namun sejak 30 Januari 2007 departemen tersebut berubah nama menjadi Departemen Imigrasi dan Kependudukan, dan posisi Amanda Vanstone digantikan oleh Kevin Andrews. Kemudian pemerintah Indonesia mengambil sikap dengan menarik dubes Indonesia di Australia dan memanggil dubes Australia untuk Indonesia, secara resmi pemerintah Indonesia telah mengirim nota protes yang berisi dua pertimbangan, memutuskan hubungan diplomatik atau perang. Langkah DEPLU untuk menarik pulang Dubes RI untuk Australia, Teuku Mohammad Hamzah Thayeb, dinilai presiden SBY langkah yang tepat.¹¹ Melalui Juru Bicara Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Elizabeth O'neil, Pemerintah Australia berkilah pemberian visa itu dengan 2 alasan, yaitu *pertama*, pengeluaran visa merupakan kebijakan dalam negeri dan sesuai dengan

¹¹ http://www.kemlu.go.id/pressroom/pressrelease/pressrelease.asp?ID_PRES=113&ID_KATEGORI=1&ID_BAHASA=1

hukum nasional Australia, kemudian pengeluaran visa juga didasarkan pada hukum internasional yaitu Konvensi PBB tahun 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol PBB tahun 1967. Alasan *kedua* yaitu, alasan kemanusiaan. Demi kemanusiaan para pencari suaka harus dilindungi.

John Howard menganggap keputusan Australia yang memberikan visa bagi 42 warga Papua tidak akan mengganggu hubungan Canberra dan Jakarta, namun anggapan itu bertentangan dengan sikap pemerintah Indonesia yang menganggap pemerintah Australia telah melakukan pengingkaran kedaulatan Indonesia terhadap Papua. Sangat mungkin Australia sedang bermain untuk memisahkan Papua dari wilayah NKRI, seperti halnya ketika memainkan Timor Timur.

Pemerintah Australia dicurigai membiayai para warga Papua yang mencari suaka politik melalui kantor urusan sosial negara itu. Para pencari suaka juga diminta untuk membuat pernyataan-pernyataan anti Indonesia, informasi tersebut disampaikan pengamat intelijen Dr AC Manullang. Menurut Manullang, para warga Papua Barat yang mendapatkan suaka itu dibekali dengan uang agar memberi pernyataan anti pemerintah Indonesia dan pernyataan tentang tidak adanya kebebasan bagi mereka yang terus menerus dikejar oleh aparat TNI dan Polri. Pemerintah Australia membayar melalui kantor urusan sosial. Selain itu dipaparkan pula, atas bantuan CIA melalui LSM-LSM ilegal di Papua, mereka merekrut dan mengindoktrinasi orang-

... dan ...

perlindungan (suaka), dan ada yang melobi masyarakat Internasional. Pimpinan lembaga kajian ilmiah bergengsi di Australia Dr. Mike Nahan sebagai Direktur Eksekutif The Institute of Public Affairs (IPA), mengungkapkan data sejumlah LSM di negeri kanguru yang mendukung gerakan separatis di Papua, bahwa organisasi mereka berbasis di Australia, dipimpin oleh para tokoh negara ini dan menerima dana dari pemerintah Australia dan sangat terkait dengan elit di Australia sendiri.¹⁴

Menurut data intelijen Indonesia, jumlah warga papua yang mencari suaka sebenarnya sudah lebih dari 42 orang mengingat jauh hari sebelumnya sudah banyak orang papua yang secara gelap masuk ke Australia.¹⁵

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat di rumuskan permasalahannya sebagai berikut :

“Mengapa Australia memberikan suaka terhadap 42 WNI asal Papua?”

E. Kerangka Dasar Teori

Sebagai penunjang yang bersifat deskriptif dalam kerangka dasar teori ini dapat digunakan teori yang relevan dengan permasalahan tersebut. Dan sebelumnya akan dipaparkan terlebih dahulu beberapa definisi mengenai teori.

Teori merupakan suatu perangkat sistematis, yaitu mengikuti aturan-aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan yang lainnya dengan data dasar sehingga dapat diamati.¹⁶

¹⁴ Ibid

¹⁵ Kedaulatan rakyat, 29 Maret 2006

¹⁶ *Metode Penelitian Kuantitatif (Bandung: PT*

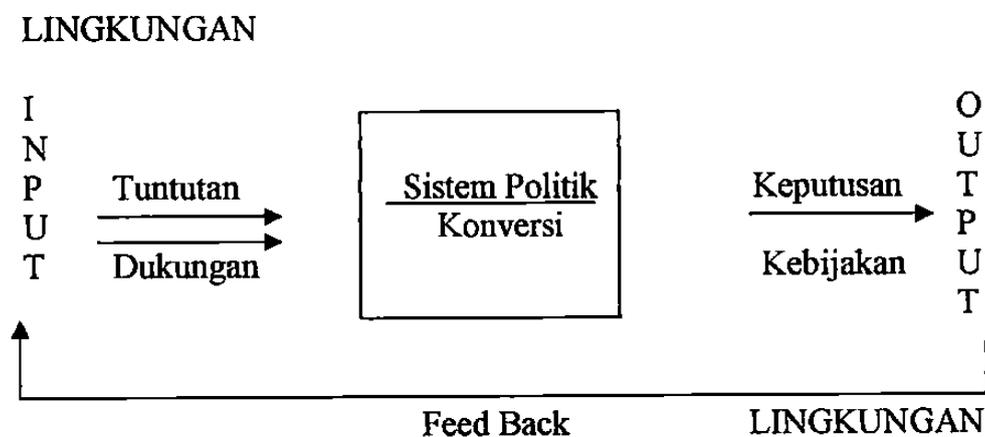
Teori adalah konsep-konsep yang saling berhubungan menurut aturan logika menjadi suatu bentuk pernyataan tertentu sehingga dapat menjelaskan fenomena tersebut secara ilmiah.¹⁷

Berdasarkan beberapa definisi teori diatas, maka penulis menggunakan Teori Sistem Politik David Easton.

Dengan melihat permasalahan yang sudah diangkat maka penulis menggunakan Teori Sistem Politik David Easton untuk menganalisa permasalahan yang penulis angkat. Sebelum memahami proses ini, perlu diketahui terlebih dahulu definisi dari konsep "sistem". Secara umum, sistem sering didefinisikan sebagai sekumpulan beberapa elemen yang saling berhubungan dan membentuk fungsi-fungsi tertentu. Untuk melihat lebih jelas proses yang terjadi dalam sistem politik, dapat dilihat dari skema yang telah digambarkan oleh David Easton, sebagai berikut:

Gambar 1.1

Teori Sistem Politik David Easton



Sumber : Mochtar Mas' oed dan Colin Mc Andrews, EDS, *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta Gajah Mada University Press, 1989 hal 5.

Ciri-ciri identifikasi. Untuk membedakan suatu sistem politik dari sistem-sistem sosial lainnya, kita harus bisa mengidentifikasinya dengan menggambarkan unit-unit dasarnya dan membuat garis batas yang memisahkan unit-unit itu dari unit-unit yang berada diluar sistem politik itu.

Sistem politik sebagai bagian dari sebuah sistem umum juga memenuhi ciri tersebut. Dalam sistem politik, juga terdapat pula beberapa elemen politik. Elemen-elemen politik itu saling berhubungan satu sama lain dalam struktur tertentu. Struktur-struktur politik itu kemudian membentuk fungsinya masing-masing, yaitu fungsi input dan fungsi output. Proses hubungan antara input dan output ini kemudian menjadi salah satu ciri sistem politik.

Dalam wacana tentang sistem politik, yang menjalankan fungsi input ini biasanya diwakili oleh kelompok masyarakat yang bukan pemerintah (*non government*). Ini berarti dapat diperankan oleh kelompok masyarakat seperti partai politik, organisasi massa, kelompok-kelompok kepentingan dan bahkan juga individu yang memiliki kualifikasi tertentu dalam bidang politik.

Kemudian yang menjalankan fungsi output adalah lembaga yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan keputusan itu bersifat otoritatif, dalam hal ini adalah pemerintah. Keputusan atau peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah itulah yang sering disebut output.

Secara singkat, proses sistem politik dapat dimulai dari adanya input yang dijalankan oleh kelompok masyarakat yang bukan pemerintah (*non government*). Input ini dapat berupa tuntutan-tuntutan (*demande*) dan

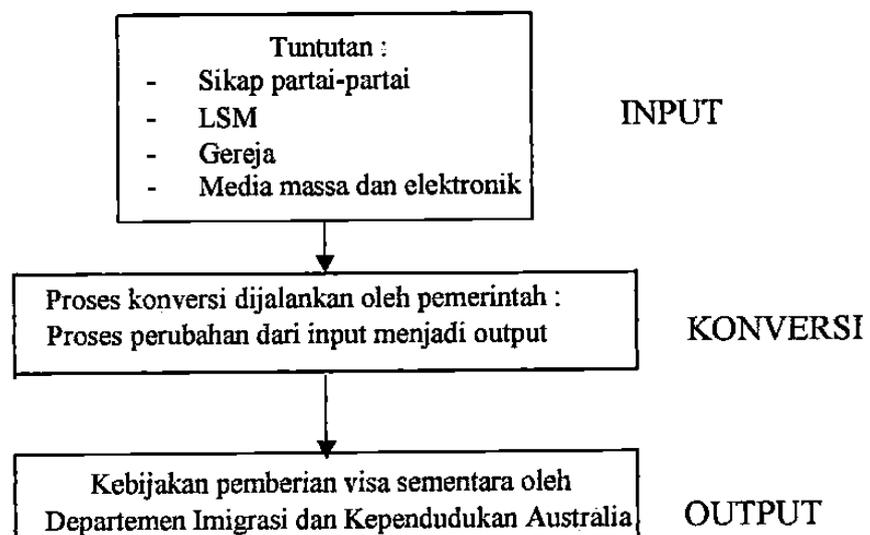
dukungan-dukungan (support). Tuntutan adalah beberapa keinginan yang muncul dari masyarakat yang diharapkan akan dapat direspon oleh pemerintah agar menjadi sebuah kebijakan atau keputusan. Kemudian tuntutan ini ada dua macam, yaitu tuntutan eksternal dan tuntutan internal. Tuntutan eksternal adalah tuntutan yang berasal dari lingkungan disekitar system itu, sedangkan tuntutan internal (withinput) adalah tuntutan yang timbul didalam sistem itu sendiri. Sedangkan dukungan biasanya dapat berupa sikap dari masyarakat yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tuntutan dan dukungan kemudian diartikulasikan kepada pihak pemerintah agar dapat dijadikan sebuah keputusan. Setelah tuntutan ataupun dukungan itu disampaikan, maka sudah menjadi tugas pemerintah agar dapat memproses input tersebut dalam sebuah lembaga tertentu. Tempat untuk memproses ini disebut *black box*, karena tidak semua pihak yang dapat mengetahui dan ikut terlibat di dalamnya. Apalagi biasanya tidak semua artikulasi kepentingan akan diproses oleh pemerintah.

Proses yang dilakukan dalam *black box* itu kemudian dikenal dengan nama konversi (conversion). Proses konversi ini merupakan proses perubahan dari input menjadi output. Dalam proses konversi ini, terjadilah agregasi kepentingan, yaitu proses memilah-milah kepentingan yang berasal dari tuntutan atau dukungan menjadi pola kebijakan umum yang pada akhirnya akan menjadi output berupa keputusan atau kebijakan. Keseimbangan antara tuntutan dan keputusan biasanya sangat tergantung dari *political will* dan juga

1. pemerintah dalam memproses kepentingan-kepentingan yang

Keputusan yang tidak sesuai dengan tuntutan yang di inginkan masyarakat, akan mengakibatkan terjadinya ketersumbatan keinginan masyarakat. Sebuah sistem politik yang dapat merespon tuntutan merupakan sistem politik yang sangat didambakan oleh banyak orang. Untuk menuju ke arah itu, diperlukan kemampuan sumberdaya manusia dan juga keinginan baik dari aparat pemerintah yang ada. Meskipun keputusan sistem politik biasanya bersifat otoritatif, namun keputusan itu masih dapat dipertimbangkan. Dalam hal ini, kelompok masyarakat yang menjalankan fungsi input tadi masih dapat memberikan respon terhadap keputusan yang telah ditetapkan. Sikap tersebut kemudian menjadi tuntutan dan dukungan bagi pemerintah untuk menerapkan atau merubah keputusan yang telah dikeluarkan. Selain itu, tuntutan maupun dukungan dari masyarakat itu kemudian juga dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk menetapkan keputusan yang akan datang. Dalam tingkat itulah dikenal adanya umpan balik (feed back) pada sebuah sistem politik.

F. Aplikasi Teori



Dari teori yang penulis gunakan, bila dikaitkan dengan peristiwa pemberian suaka WNI asal Papua oleh Pemerintah Australia maka terdapat hubungan antara sikap partai-partai, gereja, LSM, media massa dan elektronik di Australia dengan kebijakan pemberian suaka tersebut. Adanya tuntutan dari kelompok masyarakat yang bukan pemerintah (*non government*) yang kemudian dikonversikan oleh pemerintah yang menjalankan fungsi output, menyebabkan munculnya kebijakan pemberian suaka tersebut.

Input yang berupa tuntutan ini berupa sikap dari partai-partai, gereja, LSM, media massa dan elektronik di Australia yang mendukung gerakan separatisme di Papua. Para pencari suaka tersebut sebagian besar merupakan anggota gerakan pro kemerdekaan Papua Barat beserta dengan keluarganya. Dukungan tersebut berupa statemen-statemen maupun kampanye-kampanye, dan juga dukungan melalui pemberitaan di media. Kemudian melalui seminar-seminar dan juga acara konser musik guna mengumpulkan dana. Opini publik di Australia ketika para pencari suaka politik tiba di sana, hampir semua masyarakat Australia mendesak pemerintahnya untuk melindungi para pencari suaka politik.

Kemudian pemerintah menanggapi tuntutan-tuntutan yang muncul, dalam hal ini pemerintah menjalankan fungsi konversi. Disini terjadi agregasi kepentingan, yaitu proses memilah-milah kepentingan yang berasal dari tuntutan menjadi pola kebijakan umum yang nantinya akan menjadi output. Yang menjalankan fungsi ini adalah parlemen, di parlemen terjadi perdebatan-

Setelah disetujui oleh parlemen kemudian output yang berupa kebijakan pemberian visa sementara kepada 42 WNI asal Papua akhirnya dikeluarkan oleh pemerintah Australia melalui Departemen Imigrasi dan Kependudukan pada tanggal 23 Maret 2006..

G. Hipotesa

Dengan melihat pokok permasalahan “Mengapa Australia memberikan suaka terhadap 42 WNI asal Papua?”, serta kerangka dasar teori dapat diambil sebuah hipotesa singkat sebagai berikut :

Bahwa alasan yang mendorong Australia memberikan visa kepada 42 WNI yaitu :

“Adanya tuntutan (demands) dari partai-partai, gereja, organisasi masa, serta kelompok kepentingan lainnya di Australia sehingga pemerintah Australia mengeluarkan kebijakan tersebut.”

H. Metode Penulisan

Pengambilan dan pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilaksanakan dengan studi pustaka. Data yang diolah adalah data sekunder yang berasal dari literatur-literatur, majalah-majalah, surat kabar, internet, journal, makalah serta referensi-referensi yang relevan dengan skripsi.

I. Jangkauan Penelitian

Untuk lebih memudahkan dalam menganalisa data-data yang diperoleh, maka dalam hal ini penulis memberikan batasan pada jangkauan penulisannya yaitu pada Januari 2006 saat WNI asal Papua tiba di Cape York

..... pada 23 Maret 2006. Tetapi

penulis juga tidak menutup kemungkinan akan menjelaskan permasalahan diluar batasan tersebut, demi untuk memperkuat data pendukung penulisan skripsi ini agar lebih relevan.

J. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini, terdiri dari:

BAB I :

Merupakan pengantar dari materi secara keseluruhan yang memuat alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, pokok permasalahan, landasan teori, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II :

Akan dipaparkan mengenai Sistem Politik Australia.

BAB III :

Akan dijelaskan mengenai sikap partai-partai, LSM, dan gereja di Australia dalam kaitannya dengan kebijakan pemberian suaka (Proses Input).

BAB IV :

Akan dijelaskan mengenai kebijakan pemberian suaka oleh pemerintah Australia. (Proses Konversi dan Output).

BAB V :

Merupakan akhir penulisan skripsi yang merupakan kesimpulan dari